



RANHIR PERUBAHAN RENJA

RENCANA KERJA

<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/renja-2021/>



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359

Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email satpolpp@kapuashulukab.go.id

PUTUSSIBAU 78711

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang melimpahkan berkat dan rahmat Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD Tahun 2021 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Putussibau, Agustus 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,


RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.3.1 Maksud.....	3
1.3.2 Tujuan.....	3
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	4
BAB II.....	5
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	5
2.1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	5
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.3. ISI-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH..	10
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	12
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	18
BAB III	21
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	21
3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	21
3.2 TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	22
3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021	23
BAB IV	27
PENUTUP.....	27

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD 6

Tabel 2. 2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD 8

Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 13

Tabel 2. 4 Rumusan Rencana Program dan Kegiata SKPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 19

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Tahun 2021 22

Tabel 3. 2 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Target Capaian Kinerja Renja Tahun 2021 24

Tabel 4. 1 Link/ URL Download RENJA dan Dokumen SAKIP 28



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2021 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Perubahan SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakan Peraturan Daerah serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya dalam rangka mendorong terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, perlu ditunjang dengan peningkatan sistem pertahanan, keamanan dan ketertiban dengan kebijakan yang diarahkan kepada peningkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, guna mendukung pelaksanaan hal tersebut diatas serta mendukung kelancaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu maka sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mana nantinya akan digunakan sebagai pedoman / arahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang pelaksanaan pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan, pengendalian, dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
17. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tim Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 050/393/POL.PP/SET-A/2019 Tanggal 2 Desember 2019 perihal Penyusunan Ranwal RENJA 2021 dan Pengumpulan Data Kinerja Triwulan IV 2019.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan Program/ Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta, terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 adalah:

- a. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021;
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan; dan
- d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2021

BAB IV PENUTUP

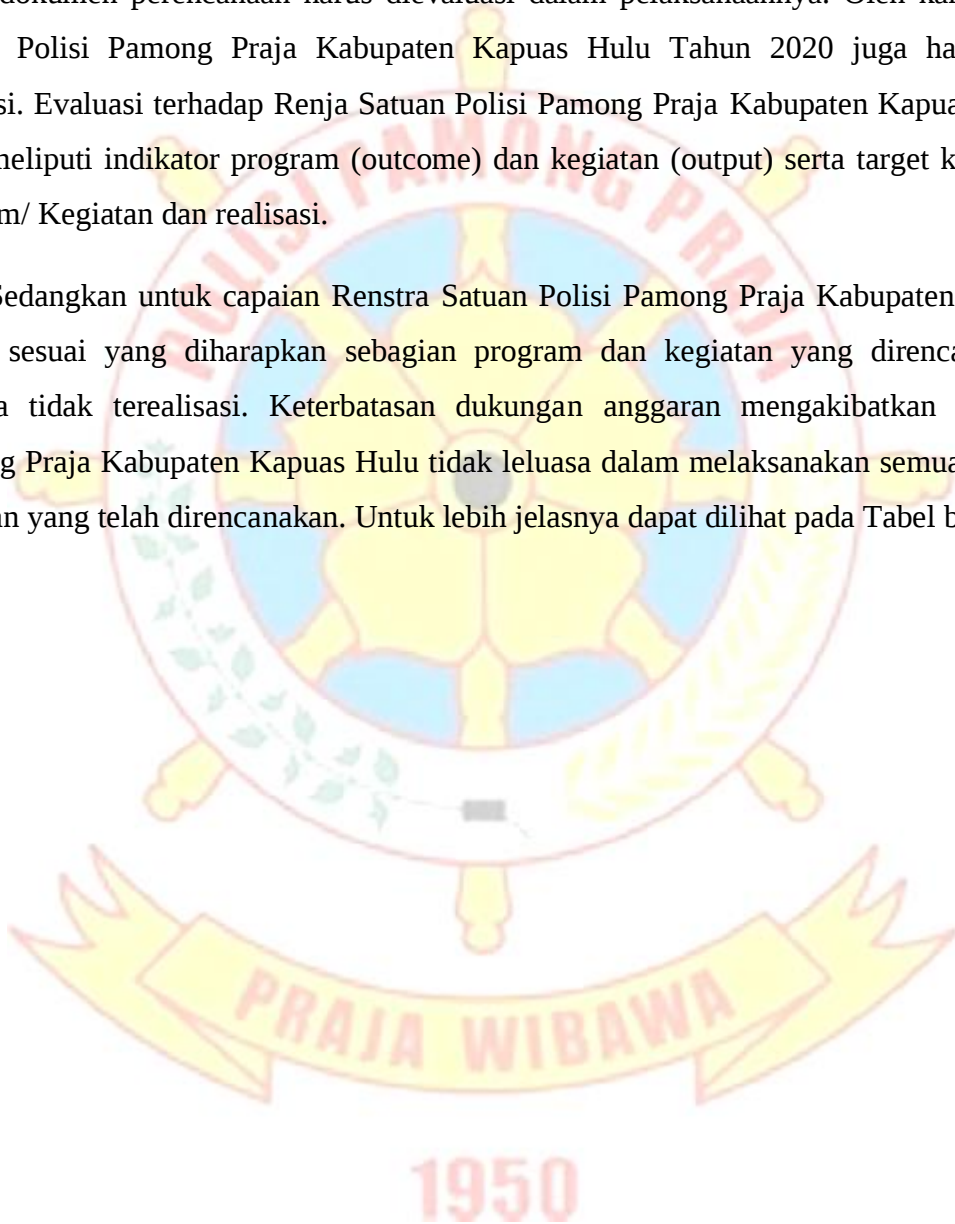
BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 meliputi indikator program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian Program/ Kegiatan dan realisasi.

Sedangkan untuk capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu belum sesuai yang diharapkan sebagian program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra tidak terealisasi. Keterbatasan dukungan anggaran mengakibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tidak leluasa dalam melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi kinerja hasil program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun/n-1) 2020	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)		Catatan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+(9)*	11=(10/4)*	12	
05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat											
01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	A	B	BB	BB	100	BB	87%	87%		
01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A	B	BB	BB	100	BB	87%	87%	
01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	95%	99%	95%	98%	103,59	95%	97%	102%	
01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian	95%	100%	95%	100%	105,26	95%	98%	104%	
01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	99%	95%	98%	103,59	95%	97%	102%	
01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	99%	95%	99%	104,21	95%	98%	103%	
01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	99%	95%	99%	104,21	95%	98%	103%	
01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	87%	99%	95%	96%	101,05	90%	95%	109%	

02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	72%	72%	100%	91%	91%	
02	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/Perkada yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	72%	72%	100%	91%	91%	
			Rasio Peugas Linmas	1,00	0,85	0,90	0,90	100,00	0,98	91%	91%	
			Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	46,99%	44,00%	45,00%	45,00%	100,00	50,00%	46%	99%	
			Persentase Anggota Linmas yang mengikuti Pelatihan Linmas	18,22%	0,00%	1,23%	0,00%	0,00	2,47%	1%	5%	
02	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	100%	72%	72%	100%	91%	91%	

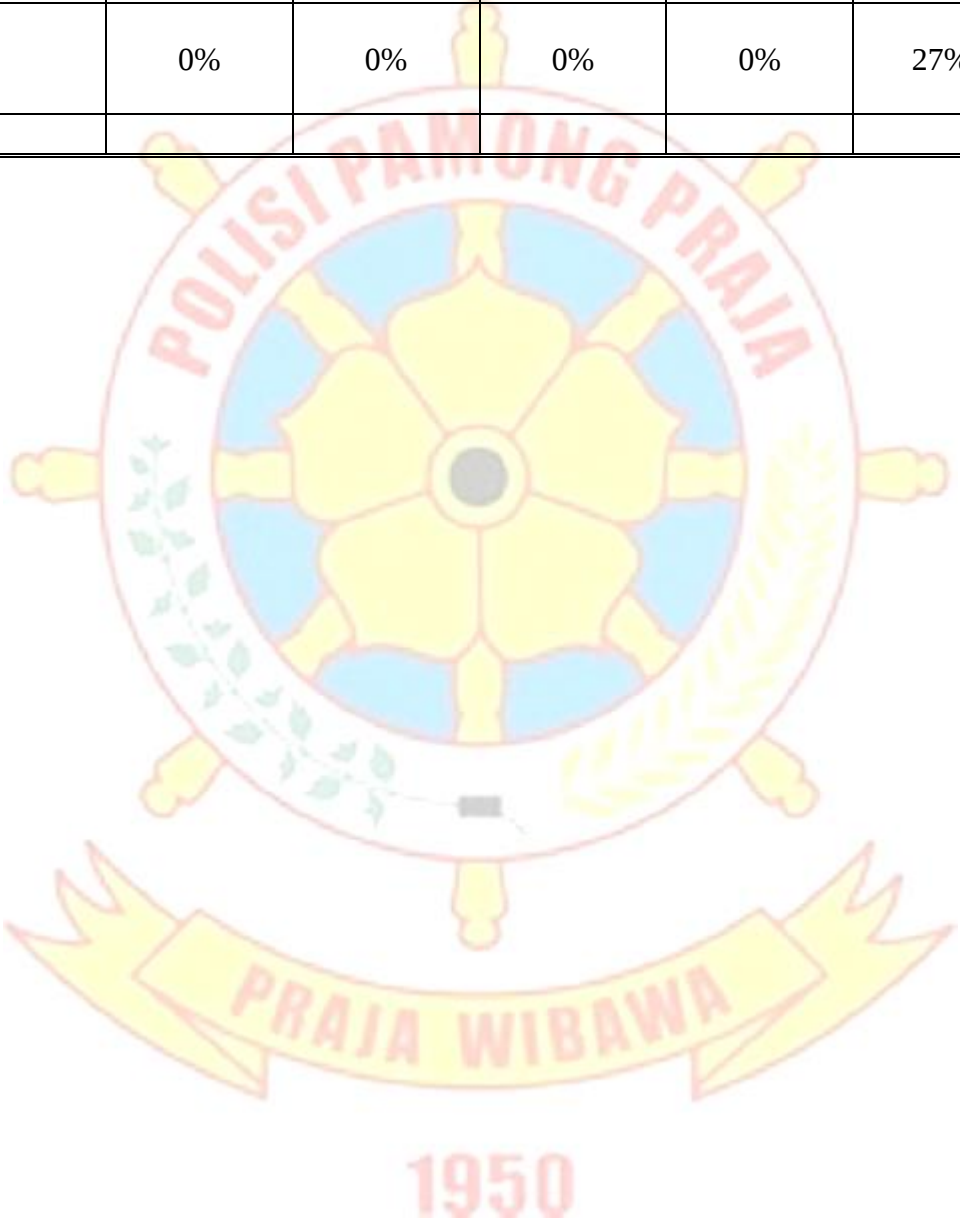
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 dan IKK Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

No	Indikator *)	SPM/standar	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		nasional	Permendagri 18 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				(tahun n-2)	(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	(tahun n-2)	(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP			B	B	BB	BB	B	BB	BB	BB	
2	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum			100%	100%	100%	100%	100%	72%	100%	100%	
3	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%		0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	
4	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani			0	0	0	0	0	31	24	1.262	
5	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan			0	0	0	0	0	0	20	21	
6	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan			0	0	0	0	0	3	3	3	
7	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS			0	0	0	1	0	0	1	1	
8	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum			-	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	
9	Tersedianya sarana prasarana minimal			0	0	0	0	Ada	Ada	Ada	Ada	
10	persentase gangguan			0%	0%	0%	100%	100%	72%	100%	100%	

	Tantribum yang diselesaikan											
11	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan			0%	0%	0%	0%	27%	27%	27%	27%	



2.3. ISI-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakkan perundangn-undangan daerah.
- c. Pelaksanaan kordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat dengan aparat kepolisian negara dan atau lembaga lainnya.
- d. Pengelolaan barang/kekayaan milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- f. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati Kapuas Hulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan Visi Bupati Kapuas Hulu yaitu **"TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL"**

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, maka misi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas, dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

1. Koordinasi antar instansi lemah;
2. Ketaatan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada sangat kurang;
3. Tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4. Peralatan dan Perlengkapan Operasional Penegkan Perda/ Perkada belum memadai;
5. Jumlah Anggota Operasional yang belum memadai;
6. Kurangnya sosialisasi tentang Perda/ Perkada ke masyarakat;
7. Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan masyarakat;
8. Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kurang;
9. Kurangnya Peran Serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
10. Tidak adanya Peralatan dan Perlengkapan anggota LINMAS;
11. Tingkat Minat Anggota Pol PP untuk mengikuti tes Jabatan Fungsional tidak ada;
12. Penerapan SPM Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda/ Perkada;
13. Anggota banyak yang tidak hadir dalam kegiatan seperti Dalmas dan Kesamaptaan;
14. Anggota LINMAS Desa tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan;
15. Belum maksimalnya Pengawasan dan Penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
16. Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana yang belum memadai;
17. Jumlah anggota Satpol PP yang belum memadai;
18. Penataan Pasar yang belum maksimal sehingga meningkatnya pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat;
19. Penggunaan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
20. Kegiatan masyarakat yang berpotensi/telah merusak lingkungan;
21. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menjaga kebersihan;
22. Penyakit masyarakat seperti perjudian, minuman keras, prostitusi dan penggunaan narkoba;
23. Kenakalan remaja dan pelajar;
24. Jumlah Pos Kamling yang tidak ideal.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut :



Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019)					Cat.
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP	BB	7.944.547.750	
2.01						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP	BB	25.287.420	
01						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perencanaan	14	6.666.580	
02	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	2	4.489.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen RKA yang dikerjakan	1	1.341.650	
03						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang dikerjakan	4	4.111.950	
04						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen DPA yang dikerjakan	1	1.613.950	
05						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang dikerjakan	4	4.679.550	
06						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Kinerja yang dikerjakan	24	1.624.790	
07	-	-	-	-	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja	4	5.248.950	
2.02						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan	95%	6.619.659.960	
01	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Menerima Tunjangan Khusus	2.688	2.422.200.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pol PP	12	6.427.539.960	
								Jumlah Aparatur Pol PP yang menerima Tunjangan Khusus	1.127		
03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	232	100.680.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	147	192.120.000	

2.05						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian	95%	44.180.000	
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	200	352.580.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	87	44.180.000	
2.06						Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	661.083.270	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor	11	23.305.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor	13	22.649.000	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan	6	8.607.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan	18	39.248.650	
03	-	-	-	-	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	9.265.500	
04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	106	195.968.000	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satuan Polisi Pamong Praja	Dokumen yang dicetak	4	17.404.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satuan Polisi Pamong Praja	Dokumen yang dicetak/ digandakan	18	24.628.120	
			Dokumen yang digandakan	11							
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Langganan Koran	5	8.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Langganan Koran	4	5.220.000	
09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Ibu Kota Provinsi dan Luar Prov.	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	6	497.518.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ibu Kota Provinsi dan Luar Prov.	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	31	316.504.000	
11	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	232	100.680.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Admin/ Operator/ Sistem Informasi yang dikerjakan	161	47.600.000	
2.07						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	47.290.000	
05	Pengadaan Mebeleur	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Mebeulair	9	13.600.000	Pengadaan Mebel	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Mebel	13	47.290.000	

2.08						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	295.556.000	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Materai dan Perangko yang dibeli	1.050	4.625.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Materai dan Perangko yang dibeli	715	4.950.000	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembayaran Telepon, Air dan Listrik	12	40.320.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembayaran Telepon/ Internet, Air dan Listrik	12	58.200.000	
			Pembayaran Tv Kabel dan Internet	6				Pembayaran Tv Kabel	12		
03	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki	27	11.900.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	29	16.560.000	
04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli	74	87.201.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli	78	215.846.000	
					Jumlah Tenaga Kontrak yang menerima Honorarium			7			
					Jumlah Iklan yang disediakan			1			
					Pembayaran Honorarium Petugas Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada			24			
2.09						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	90,00	298.781.100	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya	8	7.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya	9	278.121.100	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah BBM	18.050	233.770.000			Jumlah BBM	19.194		
			Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan	46				Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan dan Service	41		
			Jumlah Kegiatan Servis Kendaraan	25							
08	Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Website yang di kelola/dikembangkan	1	29.900.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Website yang dikelola/ dikembangkan/ dipelihara	1	20.660.000	

02						PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	1.997.652.950	
2.01						Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti	100%	1.973.038.550	
								Rasio Peugas Linmas	0,98		
								Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	40,96		
								Persentase Anggota Linmas yang mengikuti Pelatihan Linmas	1,26		
01	Pengawasan Pedagang Kaki Lima	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL	3	71.248.000		Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL	2	1.646.637.300	
	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantantibmas	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kegiatan Pengamanan	25	160.593.000			Jumlah Kegiatan Pengamanan	50		
								Jumlah Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menerima Honorarium	47		
	Pengamanan dan Pengawasan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawasan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat	12	299.400.000			Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawasan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat	100		
	Pembuatan Peta Rawan Trantibum	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Daerah Rawan Trantibum	23	44.590.000			Jumlah Daerah Rawan Trantibum	23		
								Jumlah Personil Pengamanan (Pos	79		

								Penjagaan, DAN Pos, Perwira Pengawas, Pamkat VIP dan PTI			
02	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Pelanggaran PERDA yang ditindaklanjuti	5	89.289.000	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	100%	48.567.800	
04	Bantuan Penanganan Bencana dan Kebakaran	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kejadian Bencana	3	57.300.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kapuas Hulu	Rasio Peugas Linmas	0,98	130.040.400	
	Penyuluhan dan Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Putussibau	Jumlah Peserta Penyuluhan	80	28.970.000			Persentase Penanganan bencana	50%		
								Persentase Peserta Pembinaan Potensi Linmas Desa	3,14		
05	Penyelenggaraan Bimtek Dasar Polisi Pamong Praja	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek Dasar Pol PP	100	147.500.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satuan Polisi Pamong Praja			144.693.050	
	Penilaian Kredit Point Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	41	79.490.000			Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	40,96		
	Kesamaptaan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Latihan Bela Diri dan Kesamaptaan	50	16.800.000			Persentase Aparatur yang mengikuti Pelatihan Kesamaptaan	57,47		
	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peserta Pelatihan Dalmas	50	15.500.000			Persentase Peserta Pelatihan Dalmas	68,49		
	Penyuluhan Anggota Satpol PP Kecamatan	Pts Utara & Pts Selatan	Jumlah Anggota Satpol PP Kecamatan yang mengikuti Kegiatan Penyuluhan	23	54.230.000						
	Pelatihan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Anggota yang mengikuti Pelatihan Linmas	336	88.210.000			Persentase Anggota Linmas yang mengikuti Pelatihan Linmas	1,26		
	Layanan Akibat dari	Kabupaten	Jumlah Warga Negara	20	14.500.000	Penyediaan Layanan dalam	Kab. Kapuas	Jumlah Warga Negara yang	4	3.100.000	

	Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Kapuas Hulu	yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada			rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Hulu	Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada			
03	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah kegiatan koordinasi dan kunjungan kerja	42	313.600.000					0	
	Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Peserta Apel di Kabupaten	750	117.910.000						
2.02						Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	24.614.400	
01	Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Peserta Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	85	30.546.000					0	
02	Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Pelanggaran Perda yang Termonitor dan Terevaluasi	4	52.231.000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pelanggaran Perda yang termonitor dan terevaluasi	1500	24.614.400	
TOTAL					5.646.888.000		-			9.942.200.700	-

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada bagian ini dapat kami uraikan mengenai usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, perguruan tinggi maupun seluruh SKPD Kabupaten Kapuas Hulu yang mana terdapat beberapa usul terkait peningkatan gangguan keamanan dan trantibum serta perlindungan masyarakat.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

No	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	87	
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan	18	
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	106	
	3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab./ Prov./ Pusat	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	31	
1.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	1 Pengadaan Mebel	Satpol PP	Jumlah Pengadaan Mebel	13	
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya	9	
			Jumlah BBM	19194	
			Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan dan Service	41	

2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satpol PP	Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL	2	
			Jumlah Kegiatan Pengamanan	50	
			Jumlah Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menerima Honorarium	47	
			Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawasan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat	100	
			Jumlah Daerah Rawan Trantibum	23	
			Jumlah Personil Pengamanan (Pos Penjagaan, DAN Pos, Perwira Pengawas, Pamkat VIP dan PTI	79	
	2 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Rasio Peugas Linmas	0,98	
			Persentase Penanganan bencana	0,5	
			Persentase Peserta Pembinaan Potensi Linmas Desa	3,14	
	3 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	40,96	
			Persentase Aparatur yang mengikuti Pelatihan Kesamaptaan	57,47	
			Persentase Peserta Pelatihan Dalmas	68,49	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Ini berarti daerah diberikan keleluasan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Salah satu pertimbangan yang mendasar perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Daerah kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, karena daerah-daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat didaerahnya. Pada akhirnya dapat meningkatkan *Local accountability* pemerintah terhadap rakyatnya.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu

sebagaimana tercantum dalam Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 148) : “ Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja”.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi Bupati Tahun 2021-2026. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan pernyataan diatas maka tujuan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 sesuai dengan Renstra 2021-2026 adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya;

Adapun sasaran dari Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 adalah :

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- b. Meningkatnya kondusivitas wilayah;

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Tahun 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN 2021
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB
2	Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%

3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan 2 program dan 9 Kegiatan dengan 31 Sub Kegiatan.

Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Capaian kinerja sasaran diarahkan pada upaya meningkatkan nilai SAKIP Satpol PP secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 program dan 7 Kegiatan dengan 25 Sub Kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

Sasaran 2 : Meningkatnya kondusivitas wilayah

Capaian kinerja sasaran diarahkan pada upaya meningkatkan kondusivitas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 program dan 2 kegiatan dengan 6 Sub Kegiatan yaitu

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

➤ Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

➤ Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada

➤ Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

➤ Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

➤ Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

➤ Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Tabel 3. 2 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Target Capaian Kinerja Renja Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	2020	Satuan	2021		2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					Target		Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	9		11	12	13	14	19
Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah			Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	0		0		0		Kasat
				Nilai SAKIP	BB		BB		BB		
		01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	BB	%	BB	7.944.547.750	BB	8.341.775.138	Kasat
		2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	%	BB	25.287.420	95%	26.551.791	Sekretariat
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	14	Dok.	14	6.666.580	14	6.999.909	Sub Bagian Program
		02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang dikerjakan	1	Dok.	1	1.341.650	1	1.408.733	Sub Bagian Program
		03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang dikerjakan	4	Dok.	4	4.111.950	4	4.317.548	Sub Bagian Program
		04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang dikerjakan	1	Dok.	1	1.613.950	1	1.694.648	Sub Bagian Program
		05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang dikerjakan	4	Dok.	4	4.679.550	4	4.913.528	Sub Bagian Program
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang dikerjakan	24	Dok.	24	1.624.790	24	1.706.030	Sub Bagian Program
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja	4	Krg.	4	5.248.950	4	5.511.398	Sub Bagian Program
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	95	%	95%	6.619.659.960	95%	6.950.642.958	Sekretariat
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pol PP	12	Bln	12	6.427.539.960	12	6.748.916.958	Sub Bagian Keuangan
				Jumlah Aparatur Pol PP yang menerima Tunjangan Khusus	1.127	OB	1.127		1.127		
		03	Pelaksanaan Penatausahaan	Pembayaran	147	OB	147	192.120.000	147	201.726.000	Sub Bagian

			dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan						Keuangan			
		2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian	95,00	%	95,00	44.180.000	95,00	46.389.000	Sub Bagian Umum & Aparatur		
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	100	Psg	87	44.180.000	106	46.389.000	Sub Bagian Umum & Aparatur		
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	%	95%	661.083.270	95%	694.137.434	Sekretariat		
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor	13	Jenis	13	22.649.000	13	23.781.450	Sub Bagian Umum & Aparatur		
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan	18	Unit	18	39.248.650	18	41.211.083	Sub Bagian Umum & Aparatur		
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5	Buah	1	9.265.500	1	9.728.775	Sub Bagian Umum & Aparatur		
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	88	Org	106	195.968.000	106	205.766.400	Sub Bagian Umum & Aparatur		
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dokumen yang dicetak/ digandakan	18	Jenis	18	24.628.120	18	25.859.526	Sub Bagian Umum & Aparatur		
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Langganan Koran	4	Edtr	4	5.220.000	4	5.481.000	Sub Bagian Umum & Aparatur		
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	30	Keg.	31	316.504.000	31	332.329.200	Sub Bagian Umum & Aparatur		
		11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Admin/ Operator/ Sistem Informasi yang dikerjakan	161	OB	161	47.600.000	161	49.980.000	Sub Bagian Umum & Aparatur		
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95	%	95	47.290.000	95	49.654.500	Sekretariat		
		05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	20	Unit	13	47.290.000	13	49.654.500	Sub Bagian Umum & Aparatur		
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	%	95	295.556.000	95	310.333.800	Sekretariat		
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Perangko yang dibeli	500	Lbr	715	4.950.000	715	5.197.500	Sub Bagian Umum & Aparatur		
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon/ Internet, Air dan Listrik	12	Bln	12	58.200.000	12	61.110.000	Sub Bagian Umum & Aparatur		
		03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembavaran Tv Kabel	12	Bln	12		12				
		03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	29	Unit	29	16.560.000	29	17.388.000	Sub Bagian Umum & Aparatur		
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli	78	Jenis	78	215.846.000	78	226.638.300	Sub Bagian Umum & Aparatur		
				Jumlah Tenaga Kontrak yang menerima Honorarium	7	Org	7		7				
				Jumlah Iklan yang disediakan	1	Thn	1		1				
				Pembayaran Honorarium Petugas Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada	12	OB	24		24				
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	95	%	90	298.781.100	85	313.720.155	Sekretariat		
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya	9	Unit	9	278.121.100	9	292.027.155	Sub Bagian Keuangan		
				Jumlah BBM	19.194	Ltr	19.194		19.194				
				Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan dan Service	41	Jenis	41		41				
		08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Website yang dikelola/ dikembangkan/ dipelihara	1	Web	1	20.660.000	1	21.693.000	Sub Bagian Umum & Aparatur		
		Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya	Meningkatnya kondusivitas wilayah		Indeks Rasa Aman	100%		100%		100%		Kasat	
					Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%		100%		100%			
				02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	%	100%	1.997.652.950	100%	2.097.535.598	Kasat
				2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti	100%	%	100%	1.973.038.550	100%	2.071.690.478	Bidang Penegakan dan Operasi
						Rasio Peugas Linmas	0,97	Linmas/ RT	0,98		0,99		Bid. LINMAS
						Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	40,96%		40,96%		40,96%		Bid. PKP
						Persentase Anggota Linmas yang mengikuti Pelatihan Linmas	1,26%		1,26%		3,20%		
01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,			Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL	1	Keg.	2	1.646.637.300	4	1.728.969.165	Seksi Pengendalian Operasi		

		Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kegiatan Pengamanan	27	Keg.	50		50		
			Jumlah Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menerima Honorarium	47	OB	47		0		
			Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawalan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat	50	Keg.	100		100		
			Jumlah Daerah Rawan Trantibum	0	Org	23		23		
			Jumlah Personil Pengamanan (Pos Penjagaan, DAN Pos, Perwira Pengawas, Pamkat VIP dan PTI	79	Org	79		79		
	02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Persentase Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	100%	%	100%	48.567.800	100%	50.996.190	Seksi Pengendalian Operasi
	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rasio Peugas Linmas	0,97	Linmas/ RT	0,98	130.040.400	0,99	136.542.420	Seksi Linmas
			Persentase Penanganan bencana	50%	%	50%		50%		Seksi Bina Potensi Masyarakat
			Persentase Peserta Pembinaan Potensi Linmas Desa	0	%	3,14		6,28		
	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	40,96%	%	40,96%	144.693.050	40,96%	151.927.703	Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satpol PP
			Persentase Aparatur yang mengikuti Pelatihan Kesamaptaaan	100	%	57,47		57,47		
			Persentase Peserta Pelatihan Dalmas	100,00	%	68,49		68,49		
			Persentase Anggota Linmas yang mengikuti Pelatihan Linmas	1,26	%	1,26		3,20%		Seksi PKP Linmas
	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	20	Org/ Pkt	10	3.100.000	20	3.255.000	Seksi Pengendalian Operasi
	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	%	100%	24.614.400	100%	25.845.120	Bid. Penegakan dan Operasi
	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Perda yang termonitor dan terevaluasi	24	Kasus	1.500	24.614.400	1.200	25.845.120	Seksi Penegakan dan Penyelidikan
				TOTAL			9.942.200.700		10.439.310.735	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan keamanan, Ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai keamanan, ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya

Demikian Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Agustus 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,


RUPINUS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001

Tabel 4. 1 Link/ URL Download RENJA dan Dokumen SAKIP

No	Dokumen	Link/ Alamat Web/ Url	Password		Ket
			Proteksi	Download	
1	Renstra	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/renstra-rencana-strategis/			
2	Renja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/renja-rencan-kerja/			
3	IKU	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/indikator-kinerja-utama/			
4	IKI	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/iki-indikator-kinerja-individu/			
5	Peta Proses Bisnis	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/peta-proses-bisnis/			
6	Cascading	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/cascading/			
7	Perjanjian Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/indikator-kinerja-utama/perjanjian-kinerja/	pk20\[\$%	bjhd2985	
8	Rencana Aksi Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/rencana-aksi-kinerja/	rak3\$@19	hghd640d7fo	
9	Monitoring Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/monitoring-rencana-aksi-atas-kinerja/	tr3**##19		
10	Evaluasi Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/evaluasi-kinerja/	eka”+58		
11	Laporan Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/lakip/	vsi_@^?]\.	jdktrqw1063	
12	LPPD	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/lppd/	bn269#^3>?;"[}	vdkw52047	
13	Laporan Aset	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-aset/	l630nfl',10\$	agsbvp2063	